

**KINERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015
DI KOTA PADANG PANJANG**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas M.Si



**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

**KINERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN TAHUN 2015
DI KOTA PADANG PANJANG**

Oleh: Weriza (1620869018)
Dibawah bimbingan : Dr. Asrinaldi, M.Si
Dr. Ernita Arif, M.Si

ABSTRAK

Pemutakhiran data pemilih menjadi agenda awal dalam proses tahapan pemilu dan selalu menjadi sorotan masyarakat terutama masih dijumpainya pemilih yang tidak memenuhi syarat di daftar pemilih, Fenomena di Kota Padang Panjang memperlihatkan masih adanya data pemilih yang TMS saat penetapan DPS di Kota Padang Panjang pada tanggal 1 September 2015 yang lalu sebesar 4.307 atau sebesar 10.96 % pemilih dan bila dibandingkan dengan data awal yang diterima PPDP saat turun sebesar 39.292 pemilih. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dan mengkaji dan menganalisis kendala-kendala kinerja PPDP. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yaitu penyelenggara pemilu di Kota Padang Panjang serta Disdukcapil Kota Padang Panjang dan tim kampanye. Selain itu sumber tertulis berupa hasil penelitian dan dokumen resmi dari instansi yang berwenang. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan dari daftar pemilih ini disebabkan Kinerja PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilihat dari 6 aspek yaitu (1) aspek responsivitas PPDP dapat memahami kebutuhan pemilih dan tidak terkendala faktor administrasi kependudukan, (2) aspek profesionalisme, bekerja sesuai aturan dan memiliki kompetensi yang tinggi dan memahami kewilayahan, (3) aspek produktifitas, dapat menurunkan pemilih yang tidak memenuhi syarat secara signifikan dan nihil pemilih yang ganda di DPS (4) aspek akuntabilitas, PPDP siap mempertanggungjawabkan secara internal proses dan hasil pemutakhiran data pemilih ke KPU dan secara eksternal dalam tataran hasil, (5) aspek kerjasama, PPDP telah bekerjasama dengan pihak internal KPU dan eksternal KPU dalam cokolit data pemilih dan (6) aspek kualitas pelayanan, PPDP dan KPU beserta jajarannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk kategori pemilih memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di daftar pemilih. Pemilih yang terdaftar di daftar pemilih adalah pemilih *de facto* dan *de jure* menjadi salah satu solusi agar terpenuhi prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir dalam pendataan pemilih

Kata kunci : *kinerja, pemutakhiran data pemilih, PPDP*